

IMPLEMENTASI APLIKASI BANGKIT DALAM VALIDASI DAN VERIFIKASI ANGKA KEMISKINAN

Sudi Di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka

Authors:

Muhammad Dion Amirudin¹, Muh Ryan Rahmatul Hidayat²

Affiliasi:

Univeritas Muhammadiyah Bandung²

Email:

mdamiruddin@gmail.com¹, mryanrhadayat12@gmail.com²

Received : July, 15, 2024

Revised : July, 15, 2024

Accepted : Desember 28, 2024

Available Online: Desember 31, 2024

Corresponding author

Muh Ryan Rahmatul Hidayat

Univeritas Muhammadiyah Bandung

mryanrhadayat12@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan kondisi di mana kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, tidak terpenuhi secara memadai sehingga menghambat kemampuan individu untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupannya. Di Kabupaten Majalengka, permasalahan kemiskinan teridentifikasi dengan persentase mencapai 11,21%, sementara total jumlah penduduknya sekitar 1,35 juta jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam karakteristik kemiskinan serta melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin, khususnya di Kecamatan Lemahsugih. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif. Selain itu, dilaksanakan juga observasi lapangan dan wawancara dengan memanfaatkan aplikasi BANGKIT sebagai sarana untuk menentukan skor akhir kemiskinan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Aplikasi ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis dimensi-dimensi kemiskinan secara komprehensif dan memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Hasil menunjukkan bahwa Kecamatan Lemahsugih memiliki 3.934 Kepala Keluarga (KK) yang telah terdata sebagai keluarga miskin dan menjadi sasaran utama verifikasi serta validasi. Melalui proses ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai penyebab, dinamika, dan sebaran kemiskinan di wilayah tersebut. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan publik yang lebih tepat sasaran, peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Majalengka, khususnya di Kecamatan Lemahsugih.

Kata Kunci: Kemiskinan, aplikasi BANGKIT, verifikasi, validasi

Abstract

Poverty is a condition in which basic human needs, such as food, health, education, and employment, are not adequately met, thus hindering an individual's ability to survive and develop their lives. In Majalengka Regency, the problem of poverty has been identified with a percentage reaching 11.21%, while the total population is around 1.35 million people. This study aims to explore the characteristics of poverty in more depth and to verify and validate data on the poor population, especially in Lemahsugih District. The research method used is the qualitative descriptive method. In addition, field observations and interviews were also carried out using the BANGKIT application as a means to determine the final poverty score based on certain indicators. This application allows researchers to analyze the dimensions of poverty comprehensively and obtain a deeper picture of the socio-economic conditions of the local community. The results show that Lemahsugih District has 3,934 Heads of Families (KK) who have been recorded as poor families and are the main targets of

verification and validation. Through this process, it is hoped that a more accurate understanding will be obtained regarding the causes, dynamics, and distribution of poverty in the area. Thus, the findings of this study are expected to be the basis for formulating more targeted public policies, increasing the effectiveness of poverty alleviation programs, and strengthening collaboration between local governments, social institutions, and communities in poverty alleviation efforts in Majalengka Regency, especially in Lemahsugih District.

Keywords: *Poverty, BANGKIT application, verification, validation*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang memadai (Townsend, 1979). Kondisi ini membatasi individu untuk mencapai standar hidup yang layak dan membatasi kemampuan mereka untuk mengembangkan kehidupan mereka secara berkelanjutan. Masyarakat global telah lama mengakui kemiskinan sebagai tantangan moral dan pembangunan yang memerlukan upaya bersama dari pemerintah, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan lokal (Sen, 1999). Meskipun telah banyak intervensi kebijakan, kemiskinan masih terjadi di banyak bagian dunia, terutama di negara-negara berkembang di mana faktor struktural, sumber daya yang terbatas, dan kesenjangan sosial-ekonomi terus menghambat upaya pemberantasan. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang terbesar, juga bergulat dengan tantangan ini, yang mencerminkan interaksi yang kompleks antara faktor-faktor sosial-ekonomi, budaya, dan infrastruktur.

Selama bertahun-tahun, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai strategi penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di seluruh kepulauannya yang luas. Secara nasional, strategi ini berkisar dari program bantuan tunai langsung hingga inisiatif pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam efektivitas program-program tersebut, khususnya ketika membandingkan daerah-daerah yang memiliki infrastruktur yang kuat dengan daerah-daerah yang masih kekurangan layanan dasar (Hulme & Shepherd, 2003). Keragaman geografi Indonesia yang mencakup ribuan pulau semakin mempersulit upaya pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menyesuaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional dengan tantangan-tantangan khusus di wilayah hukum masing-masing.

Kabupaten Majalengka, yang terletak di Provinsi Jawa Barat, menjadi contoh yang relevan untuk memahami kompleksitas kemiskinan lokal. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Majalengka (2023), wilayah tersebut memiliki tingkat kemiskinan sebesar 11,21 persen. Angka ini menandakan bahwa lebih dari 150.000 penduduk—dari total populasi sekitar 1,35 juta jiwa—hidup dalam kondisi kemiskinan. Dalam konteks Jawa Barat yang lebih luas, tingkat kemiskinan Majalengka tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di provinsi tersebut, yang menunjukkan tantangan sosial-ekonomi dan infrastruktur. Karena kemiskinan mencakup berbagai aspek yang saling terkait—mulai dari pendapatan rendah dan pengangguran hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai—mengidentifikasi dan memverifikasi profil demografi rumah tangga miskin menjadi keharusan untuk merancang intervensi yang tepat sasaran.

Salah satu masalah berulang yang memperburuk upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka adalah kesenjangan antara data yang tersedia dan

kenyataan yang diamati di lapangan. Ketidakkonsistenan dalam pengelolaan data dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, kebijakan yang tumpang tindih, dan bantuan yang salah arah. Misalnya, rumah tangga yang diidentifikasi sebagai miskin dalam catatan resmi mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan jika keadaan mereka telah berubah seiring waktu; sebaliknya, keluarga yang baru miskin mungkin tetap tidak tercatat, sehingga dikecualikan dari program bantuan sosial. Ketidakkuratan dalam proses pengumpulan, kompilasi, dan pemutakhiran data ini menandakan perlunya kerangka verifikasi dan validasi yang lebih andal dan didukung secara teknologi (Bank Dunia, 2020). Dengan menyempurnakan akurasi dan ketepatan waktu data kemiskinan, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan pengambilan keputusan strategis dan secara efisien mengarahkan sumber daya ke daerah atau populasi yang paling membutuhkannya. Kemajuan teknologi terkini menawarkan peluang yang menjanjikan untuk mengatasi kesenjangan pengelolaan data ini. Secara global, inovasi digital telah mengubah berbagai bidang administrasi publik, menjadikan proses lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sen, 1999). Di Indonesia, penggunaan platform digital untuk tata kelola—umumnya disebut e-government—semakin banyak diadopsi, meskipun masih ada tantangan dalam memastikan akses yang adil terhadap teknologi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Dalam konteks Kabupaten Majalengka, keputusan pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi BANGKIT menggarisbawahi pentingnya memanfaatkan inovasi teknologi untuk menyempurnakan dan memperbaiki data terkait kemiskinan. Aplikasi BANGKIT dirancang untuk memfasilitasi proses verifikasi dan validasi sistematis dengan mengadopsi indikator kemiskinan yang terstandarisasi. Indikator-indikator ini biasanya mencakup variabel ekonomi (misalnya, pendapatan rumah tangga, status pekerjaan, dan akses ke layanan keuangan), serta aspek sosial budaya (misalnya, tingkat pendidikan, kepemilikan asuransi kesehatan, dan kualitas perumahan). Dengan memanfaatkan perangkat digital tersebut, pejabat dan peneliti setempat dapat mengurangi kesalahan manual, meminimalkan duplikasi catatan, dan melacak perubahan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu. Pendekatan terstruktur ini sejalan dengan praktik terbaik global yang menekankan pembuatan kebijakan berbasis bukti dan intervensi berbasis data (Hulme & Shephe

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah memanfaatkan tren ini dengan menanamkan aplikasi BANGKIT ke dalam proses administratifnya untuk pengelolaan data kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keandalan data dan memastikan bahwa langkah-langkah kebijakan selanjutnya lebih akurat sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh masyarakat miskin di kecamatan perkotaan dan pedesaan. Selain itu, penerapan aplikasi BANGKIT memfasilitasi kolaborasi dan kesempatan belajar bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa yang sedang melakukan magang. Para mahasiswa ini tersebar di berbagai kecamatan untuk melakukan observasi lapangan, wawancara, dan entri data menggunakan metrik standar aplikasi. Keterlibatan tersebut memiliki tujuan ganda: pertama, memperkuat tenaga kerja yang tersedia untuk memverifikasi dan memvalidasi data kemiskinan, sehingga mempercepat laju pengumpulan data; kedua, menumbuhkan rasa keterlibatan masyarakat dan kompetensi profesional di kalangan mahasiswa, yang dilatih untuk melakukan pengumpulan data dengan pola pikir ilmiah dan etis. Penempatan pekerja magang ini sejalan dengan upaya untuk mempromosikan “kewarganegaraan aktif”, di

mana anggota masyarakat—terutama pemuda—berpartisipasi dalam proses tata kelola dengan cara yang bermakna dan nyata (Townsend, 1979).

Fokus makalah ini adalah pada salah satu kecamatan di Kabupaten Majalengka—Kecamatan Lemahsugih. Data awal menunjukkan bahwa 3.934 rumah tangga di Lemahsugih telah diidentifikasi sebagai miskin dan karenanya memerlukan verifikasi dan validasi menyeluruh. Jumlah yang begitu besar menunjukkan parahnya kemiskinan di kecamatan ini, serta potensi ketidakkonsistenan dalam data yang ada yang harus diperbaiki untuk memastikan respons kebijakan yang tepat. Dengan menganalisis hasil proses verifikasi dan validasi yang difasilitasi oleh aplikasi BANGKIT, makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana teknologi dapat memperlancar inisiatif penanggulangan kemiskinan tingkat lokal. Makalah ini selanjutnya membahas implikasi yang lebih luas dari integrasi teknologi dalam administrasi publik, menyoroti perlunya infrastruktur digital yang kuat, pengembangan kapasitas bagi pengguna, dan dukungan kelembagaan yang kuat untuk memastikan keberlanjutan solusi e-pemerintahan. Meskipun inovasi digital menawarkan banyak manfaat, penting untuk mengakui adanya kesenjangan yang ada dalam literasi digital dan pembangunan infrastruktur. Akses internet masih belum merata di seluruh kecamatan, dan beberapa daerah masih menghadapi masalah konektivitas yang menghambat pengunggahan data secara real-time atau proses verifikasi daring (BPS Kabupaten Majalengka, 2023). Selain itu, keberhasilan penerapan BANGKIT bergantung pada kemauan berbagai pemangku kepentingan—termasuk kepala desa, tokoh masyarakat setempat, dan warga sendiri—untuk mengadopsi metode pengumpulan data baru. Hal ini menggarisbawahi bahwa adopsi teknologi merupakan proses sosial dan budaya sekaligus teknis. Pengguna perlu memercayai integritas, keakuratan, dan tujuan sistem, dan pejabat setempat harus dilatih untuk memecahkan masalah, menafsirkan data, dan memelihara basis data aplikasi. Tanpa strategi komprehensif yang menangani unsur-unsur manusia ini, transisi ke verifikasi digital dapat tetap parsial, sehingga menghambat tujuan keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan. Implikasi dari studi ini ada tiga. Pertama, dari sudut pandang teoritis, penelitian ini menanggapi seruan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi dapat diintegrasikan ke dalam kerangka kerja penanggulangan kemiskinan (Bank Dunia, 2020). Pengalaman Kabupaten Majalengka dapat berkontribusi pada studi perbandingan tentang adopsi teknologi dalam tata kelola di berbagai konteks sosial-ekonomi dan budaya. Kedua, dari segi kebijakan, penelitian ini menyoroti perlunya pembuatan kebijakan berbasis bukti. Data kemiskinan yang akurat dan terkini mendukung desain intervensi yang tidak hanya tepat sasaran tetapi juga terukur dalam hal hasil. Terakhir, dari perspektif praktis, aplikasi BANGKIT dan program magang menunjukkan bagaimana lembaga akademis, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk mendorong upaya pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan mahasiswa secara aktif, inisiatif ini memanfaatkan perspektif baru dan energi segar yang dapat mendorong pendekatan inovatif terhadap tantangan sosial yang terus-menerus (Sen, 1999).

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis terperinci tentang bagaimana inovasi teknologi bersinggungan dengan validasi dan verifikasi data kemiskinan di Kabupaten Majalengka, dengan fokus khusus pada Kecamatan Lemahsugih. Selanjutnya mengeksplorasi strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan Jawa Barat, menganalisis dasar-dasar konseptual intervensi berbasis teknologi, menguraikan kerangka metodologis untuk pengumpulan data, dan menyajikan diskusi komprehensif

tentang temuan dari implementasi aplikasi BANGKIT. Artikel ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan data, pengembangan kapasitas di antara para pemangku kepentingan lokal, dan pembentukan dukungan infrastruktur yang kuat. Dengan demikian, diharapkan bahwa studi ini tidak hanya akan berkontribusi pada wacana akademis tentang penanggulangan kemiskinan dan adopsi teknologi, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi para praktisi dan pembuat kebijakan yang berupaya meningkatkan efektivitas inisiatif penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang memanfaatkan data survei dan observasi langsung di lapangan untuk memverifikasi dan memvalidasi tingkat kemiskinan di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif sangat efektif untuk menangkap kompleksitas fenomena sosial dan memahami makna yang dilekatkan pada fenomena tersebut oleh partisipan. Peneliti menerima data awal tentang rumah tangga yang tergolong miskin sebelum memulai proses verifikasi dan validasi yang mendalam.

Mekanisme utama pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara langsung, di mana peneliti terlibat dalam interaksi tatap muka dengan anggota masyarakat yang tercatat miskin. Pendekatan ini memungkinkan triangulasi informasi dan memastikan bahwa perspektif subjektif dan indikator objektif terintegrasi ke dalam analisis (Yin, 2009). Aplikasi BANGKIT, yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses verifikasi dan validasi. Dengan hanya memasukkan nama atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam aplikasi, serangkaian indikator yang telah ditetapkan sebelumnya—seperti pendapatan rumah tangga, akses ke layanan dasar, dan kondisi kehidupan—muncul di layar, yang memungkinkan para peneliti untuk melakukan penilaian sistematis secara real time. Setelah mengevaluasi indikator-indikator ini, aplikasi menghasilkan skor akhir untuk memandu klasifikasi kemiskinan.

Alat digital ini meningkatkan keandalan dan efisiensi pengumpulan data, mencerminkan praktik terbaik dalam tata kelola elektronik yang menekankan keakuratan, transparansi, dan aksesibilitas (Miles & Huberman, 1994). Untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya, tim peneliti dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, yang masing-masing ditugaskan ke desa tertentu di Kecamatan Lemahsugih. Pejabat desa memberikan dukungan tambahan dengan memetakan data yang ada dan mengarahkan peneliti ke rumah tangga yang relevan. Dengan menggabungkan metode yang digerakkan oleh teknologi dengan penyelidikan berbasis lapangan, proses tersebut mematuhi ketelitian akademis dan pertimbangan praktis, sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat tentang kondisi kemiskinan di Kecamatan Lemahsugih.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan selama kurang lebih 20 hari memberikan hasil yang cukup sesuai dengan data awal yang telah diberikan kepada praja saat awal melakukan pendataan. Berdasarkan akumulasi data dalam aplikasi BANGKIT di Kecamatan Lemahsugih maka dapat dilihat seperti berikut.

Map Keluarga Miskin Kecamatan LEMAHSUGIH

← Kembali

Lokasi Kecamatan



Detail Kecamatan

Nama Kecamatan	Akumulasi Skor
LEMAHSUGIH	39188
Kelurahan/Desa	Keluarga Miskin
19 Kelurahan/Desa	3701 Keluarga
Latitude	Longitude
-7.0079674	108.1093986

Dalam data tersebut Sebagian besar Masyarakat yang sebelumnya terdata sebagai Masyarakat miskin tetap berada dalam. Pada data awal terdapat 3934 KK yang terdata sebagai keluarga miskin dan setelah dilakukan proses verifikasi dan validasi maka terdapat 3701 KK yang terdata sebagai keluarga miskin.

Validasi dan verifikasi data kemiskinan merupakan Langkah yang cukup bagus yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka guna mengetahui angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Hal ini dilakukan agar Masyarakat yang menerima bantuan memang benar-benar layak mendapatkannya serta lebih tepat sasaran. Teknologi juga memberi peran yang cukup penting dengan adanya aplikasi BANGKIT sehingga memudahkan proses verifikasi dan validasi dengan aspek-aspek yang telah ditentukan sebelumnya dalam menilai tingkat kemiskinan.

Dalam melakukan proses verifikasi dan validasi di aplikasi BANGKIT ada beberapa aspek yang menjadi penilaian dalam menentukan tingkat kemiskinan. Dari beberapa aspek tersebut dapat dilihat hasilnya seperti berikut.

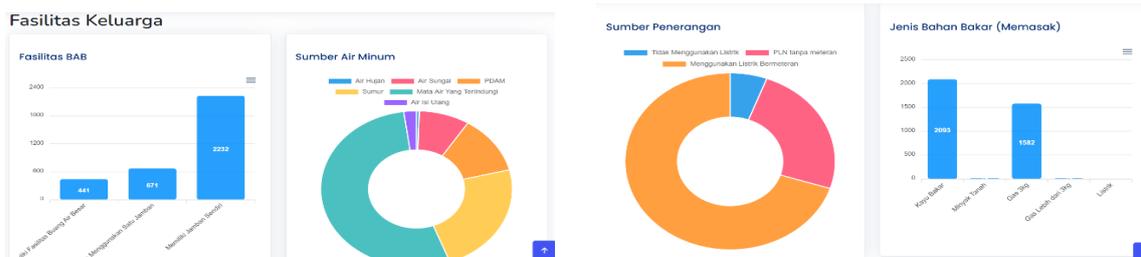
1. Tipologi Bangunan

Tipologi Bangunan



Dari data tersebut dapat dilihat bahwa banyak yang memiliki rumah dengan mayoritas luas bangunan kurang dari 9 meter persegi per orangnya dengan mayoritas menggunakan lantai keramik, dinding berupa anyaman bambu serta jenis atap berupa genteng. Mayoritas penduduk walaupun dalam keadaan miskin tetap menggunakan genteng dikarenakan Kecamatan Lemahsugih dikenal sebagai salah satu penghasil genteng sehingga genteng dianggap cukup murah untuk digunakan.

2. Fasilitas keluarga.



Dalam data tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas keluarga memiliki jamban sendiri serta menggunakan mata air yang dilindungi sebagai sumber air minum. Secara geografis, Kecamatan Lemahsugih berada di pegunungan sehingga banyak mata air yang terlindungi di wilayah ini. Sumber penerangan yang digunakan mayoritas berupa listrik bermeran namun untuk bahan bakar memasak mayoritas masih menggunakan kayu bakar. Hal ini juga dikarenakan letak Kecamatan Lemahsugih yang berada di pegunungan sehingga kayu bakar masih cukup mudah ditemukan.

3. Kepala Keluarga



Mayoritas kepala keluarga memiliki tingkat pendidikan hanya lulus SD, hal ini mungkin dikarenakan faktor-faktor tertentu yang memengaruhi tingkat pendidikan di Kecamatan ini. Mayoritas yang terdata sebagai masyarakat miskin juga tidak memiliki asset diatas Rp. 1.500.000,00 yang membuktikan bahwa masyarakat tersebut memang berada dalam keadaan miskin.

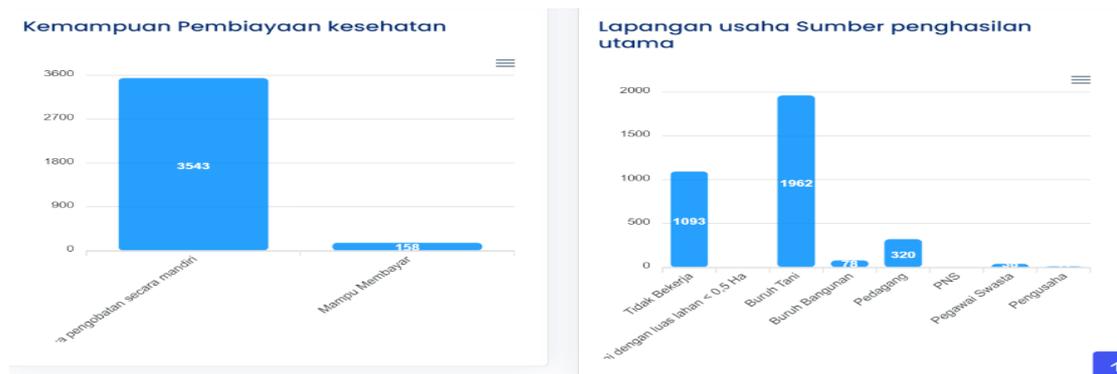
4. Memenuhi Kebutuhan Primer dan Sekunder

Mempenuhi Kebutuhan Primary Dan Sekunder



Mayoritas dari masyarakat miskin yang terdata memang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Berdasarkan hasil pendataan verifikasi dan validasi yang dilakukan mayoritas memiliki total pendapatan dibawah Rp.1.500.000,00 sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan mayoritas memiliki kemampuan makan hanya dua kali sehari dengan kemampuan membeli daging, ayam dan susu maksimal satu kali dalam seminggu. Hal ini juga berkaitan dengan aspek berikutnya.

5. Kemampuan Pembiayaan Kesehatan dan Sumber Penghasilan Utama



Dari data di atas dapat dilihat bahwa hampir semua masyarakat yang terdata miskin kesulitan dalam membiayai pengobatan secara mandiri. Mayoritas yang terdata sebagai masyarakat miskin hanya bekerja sebagai buruh tani bahkan banyak juga yang tidak bekerja. Hal ini mungkin juga dikarenakan faktor geografis dari Kecamatan Lemahsugih yang terletak di pegunungan sehingga mayoritas masyarakat berkebun ataupun bertani.

Dari semua aspek yang disediakan dalam aplikasi BANGKIT dapat menentukan kondisi kemiskinan seseorang sehingga proses verifikasi dan validasi dapat terlaksana dengan baik walau terdapat berbagai permasalahan dalam proses verifikasi dan validasi seperti masalah jaringan internet yang belum menjangkau semua wilayah Kecamatan Lemahsugih serta aplikasi yang masih sering *maintenance* hingga permasalahan dalam hal kesulitan akses menemukan masyarakat miskin dikarenakan kondisi geografis Kecamatan Lemahsugih yang berada di pegunungan sehingga jalanan yang dilalui cukup berliku dalam mendata warga miskin yang ada. Selain itu, dalam hal administrasi kependudukan ada sebagian warga yang NIK tidak tercatat dan kurangnya pembaharuan sehingga ada sebagian warga telah wafat namun masih tercatat dalam warga miskin.

Upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini berupa pemberian bantuan sosial bagi Masyarakat yang layak menerima serta pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki secara lebih maksimal dan pengembangan kemampuan Masyarakat agar memiliki lapangan usaha dalam mencari pendapatan untuk meningkatkan taraf hidup. Peran pemerintah sangat diharapkan agar dapat hadir di Tengah Masyarakat sebagai pengayom untuk membantu Masyarakat memperbaiki taraf hidup dan keluar dari kemiskinan.

Pembahasan

Temuan dari proses verifikasi dan validasi yang dilakukan di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, menggarisbawahi sifat kemiskinan yang beraneka ragam dan pentingnya pengumpulan data yang akurat. Sejalan dengan perspektif Chambers (1995) tentang kemiskinan sebagai kondisi yang dinamis dan spesifik konteks, studi ini mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar rumah tangga yang awalnya diidentifikasi sebagai miskin tetap berada dalam klasifikasi itu, sejumlah besar yang terlihat dikecualikan setelah proses verifikasi yang komprehensif.

Hasil seperti itu menggarisbawahi kegunaan evaluasi ulang yang konsisten dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Lebih jauh, seperti yang dikemukakan Carter dan Barrett (2006), aspek struktural—seperti pencapaian pendidikan, akses kesehatan, dan kepemilikan aset—memainkan peran penting dalam melanggengkan atau mengurangi kemiskinan. Data dari aplikasi BANGKIT menyoroti ketimpangan struktural di Kecamatan

Lemahsugih: tipologi bangunan menggambarkan kondisi kehidupan yang sederhana, dengan rata-rata luas tempat tinggal di bawah sembilan meter persegi per orang, sementara fasilitas keluarga menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga, meskipun memiliki akses ke sumber air bersih dan listrik, masih bergantung pada kayu bakar untuk memasak.

Ketergantungan ini menggarisbawahi persimpangan faktor geografis seperti medan pegunungan Lemahsugih, dan peluang ekonomi yang terbatas, yang mendorong banyak rumah tangga untuk tetap sangat bergantung pada sumber daya alam. Selain itu, data menunjukkan bahwa kepala rumah tangga umumnya hanya memiliki pendidikan sekolah dasar, sehingga menguatkan penelitian yang ada bahwa pencapaian pendidikan yang rendah membatasi pilihan untuk menghasilkan pendapatan. Ketergantungan yang tinggi pada tenaga kerja pertanian yang tidak teratur dan kurangnya pekerjaan alternatif memperparah kerentanan dan berkontribusi pada kerawanan pangan, tercermin dari prevalensi rumah tangga yang berjuang untuk membeli makanan sehari-hari dan sumber makanan yang kaya nutrisi. Sejalan dengan temuan Cleary dan Quinn (2016) tentang inovasi digital yang meningkatkan efisiensi sektor publik, aplikasi BANGKIT menunjukkan janji teknologi dalam menyederhanakan proses validasi data kemiskinan.

Dengan menghubungkan berbagai indikator kemiskinan yang meliputi perumahan, fasilitas rumah tangga, kapasitas keuangan, dan pembiayaan kesehatan, ke dalam satu platform digital, pemerintah dapat segera mengklasifikasikan rumah tangga dan memastikan bahwa bantuan hanya ditujukan kepada mereka yang memenuhi kriteria kelayakan. Namun, tantangan tetap ada, termasuk jangkauan jaringan yang tidak merata di seluruh wilayah pegunungan Lemahsugih dan masalah pemeliharaan sesekali yang menghambat entri dan pengambilan data secara real-time. Situasi ini menunjukkan bahwa transisi ke tata kelola digital tidak dapat dipisahkan dari investasi infrastruktur dan pengembangan kapasitas berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan lokal.

Ada juga bukti adanya komplikasi administratif, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar dan orang yang meninggal yang masih tercantum dalam daftar resmi. Perbedaan ini menggarisbawahi perlunya upaya kolaboratif yang berkelanjutan antara lembaga pemerintah, pemimpin masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyempurnakan keakuratan data. Selain itu, penting untuk mengembangkan strategi yang disesuaikan secara lokal yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada sambil memperluas program pendidikan dan pelatihan, sehingga membekali penduduk dengan pilihan mata pencaharian yang lebih beragam. Pada akhirnya, peran pemerintah sebagai fasilitator dan penjamin pembangunan inklusif tetap penting dalam menangani masalah-masalah ini secara holistik. Pelajaran yang diperoleh dari Kecamatan Lemahsugih tidak hanya memvalidasi pentingnya verifikasi dan validasi rutin, tetapi juga menjadi model bagi daerah lain yang berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui intervensi yang metodis dan berbantuan teknologi, di samping perbaikan struktural yang lebih luas.

Kesimpulan

Setelah seluruh pendataan selesai dilakukan, maka dapat dilihat bahwa Masyarakat yang tercatat sebagai Masyarakat miskin di Kecamatan Lemahsugih mayoritas masih tergolong miskin sehingga dapat disimpulkan bantuan pemerintah cukup tepat sasaran terhadap Masyarakat miskin di Lemahsugih. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan di Kecamatan Lemahsugih membuktikan bahwa data yang

diberikan sebelumnya untuk verifikasi dan validasi merupakan data yang cukup valid dikarenakan tidak banyak yang berubah dari data yang telah ada sebelumnya. Saran yang penulis berikan berupa perbaikan aspek dalam aplikasi BANGKIT agar lebih spesifik dalam menentukan kemiskinan. Serta dilakukan integrasi dengan perangkat kecamatan bahkan perangkat desa agar aplikasi BANGKIT dapat digunakan sehingga memberikan data yang lebih akurat dan *update* dikarenakan perangkat desa merupakan yang paling dekat dan mengetahui keadaan Masyarakat yang ada di desa tersebut.

Daftar Pustaka

- BPS Majalengka Regency. (2023). Statistik Kabupaten Majalengka 2023. Badan Pusat Statistik Majalengka.
- Carter, M. R., & Barrett, C. B. (2006). The economics of poverty traps and persistent poverty: An asset-based approach. *Journal of Development Studies*, 42(2), 178-199.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173-204.
- Cleary, S., & Quinn, M. (2016). The transformative power of e-governance: Fostering transparency, efficiency, and accountability. *International Journal of Public Administration in the Digital Age*, 3(4), 1-15.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hulme, D., & Shepherd, A. (2003). Conceptualizing chronic poverty. *World Development*, 31(3), 403-423, [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00222-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00222-X)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Sen, Amartya, (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press, <http://www.c3l.uni-oldenburg.de/cde/OMDE625/Sen/Sen-intro.pdf>
- Townsend, P. (1979). *Poverty in the United Kingdom: A survey of household resources and standards of living*, University of California Penguin Books, https://books.google.co.id/books/about/Poverty_in_the_United_Kingdom.html?id=J3eaAAAAIAAJ&redir_esc=y
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank Publications, <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020>
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*, (4th ed.). SAGE Publications.